

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Litelatur

- Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta. Penerbit Pancur Siwah. tahun 2004.
- Adami .Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. PT.Alumni. Tahun 2008.
- Ali Ahmad. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*. Cetakan Kedua. Ciawi- Bogor : Ghalia Indonesia. tahun 2005.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. tahun 2004.
- Asshidiqie Jimly. *Etika Birokrasi Penegakan Hukum Dan "Good Governance."* Jakarta. Lembaga Administrasi Negara. tahun 2000.
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi, tahun 2010.
- Dwiyanto Agus. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. tahun 2003.
- Effendi Marwan. *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance* . Jakarta.Timpani. Tahun 2010.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Suatu Pengantar. PT Refika Aditama: Bandung. tahun 2011.
- Fathullah. *Otonomi Daerah Dan Penguatan Hukum Masyarakat Konsultan Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta. CIDES. tahun 2000.
- Hanifah Harsono. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta. Rihenska Karsa. tahun 2002.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *HAM Dalam Kerangka Integrasi Nasional Dan Pembangunan Huku*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia. tahun 2003
- Hesel Nogi Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lukman Offset YPAPI. tahun 2003.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta.PT. Raja Grafindo. tahun 2006.
- Kelana Momo. *Hukum Kepolisian*. Gramedia Widayasarana. Jakarta. Indonesia. Tahun 2002.

- M. Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara, tahun 2002.
- Moch, Faisal Salam. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju . Bandung. tahun 2001.
- Nuridin, Syafruddin dan Usman. Basyiruddin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta. Ciputat Press. tahun 2003.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2006.
- \_\_\_\_\_, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2009.
- Robbins Stephen P, *Prinsip – prinsip Perilaku Organisasi*, Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama, tahun 2000.
- Setiawan Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung. Remaja Rosdakarya offset. tahun 2004.
- Soekanto Soerjono. *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. tahun 2008.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, tahun 2010.
- Usman Nuridin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. tahun 2002.
- Utomo Hadi Warsito, , *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, tahun 2005.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, tahun 2005.
- Wignjosuebrotto, Sutandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. tahun 2003.
- Wijayanto, dkk. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. tahun 2010.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang No.8 tahun1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang – Undang No 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang – Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Keputusan Walikota Magelang Nomor : 700/23/112 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Magelang.

### **C. Karya Ilmiah**

BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta, Tim Pengkajian SPKN RI , tahun 2002.

### **D. Sumber Lainnya**

<http://www.kompas.com/2016/pungli-upaya-mendapat-kepercayaan-publik-dan-penegakan-hukum.html> diambil pada hari rabu tanggal 26 oktober 2016 pukul 17.49 wib.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html> diambil pada hari rabu tanggal 27 oktober 2016, pada pukul 22.25 wib.

<http://anca45-kumpulan-makalah.blogspot.co.id/2011/11/reformasi-hukum-di-indonesia.html> diambil pada pada hari kamis tanggal 27 oktober 2016 pukul . 09.17 wib.

<http://www.karyatulisilmiah.com/wp-content/uploads/2016/03/Faktor-Faktor-yang-Mempengaruhi-Penegakan-Hukum.doc> diambil pada hari selasa tanggal 17 januari 2017 pukul 22.47 wib.

<http://www.kompas.com/Pelaku-Pungli-Bisa-Dijerat-Pasal-Korupsi-Bukan-Hanya-Pemerasan.html> diambil pada Kamis 20 Oktober 2016 pada pukul 12.01 wib.

<http://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html> di akses pada tanggal 25 Juli 2017 Pukul 01.05 wib.

<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealitakehidupan-bermasyarakat.html> di akses pada tanggal 25 Juli 2017 Pukul 01.50 wib.

<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealitakehidupan-bermasyarakat.html> di akses pada tanggal 25 Juli 2017 Pukul 00.16 wib.

Data Primer diolah dari hasil wawancara dengan Kasubag Hukum Polres Magelang Kota Ibu Budi Suwarni pada tanggal 25 Maret 2017, selaku kepala unit yustisi Satgas saber Pungli Polres Magelang Kota.